

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana Arctic Council mengimplementasikan *Strategic Plan* sebagai upaya perlindungan lingkungan di kawasan Arktik pada periode 2021 sampai 2025. Berdasarkan keseluruhan analisis pada Bab II dan Bab III, dapat disimpulkan bahwa implementasi tersebut berlangsung melalui *management approach*, yaitu pendekatan ketika organisasi internasional tidak menegakkan kepatuhan melalui sanksi, melainkan membantu negara anggota mengatasi keterbatasan kapasitas agar komitmen tetap dapat dijalankan (Joachim et al., 2008). Pendekatan ini terwujud dalam rangkaian utuh dua tahap yang saling terhubung, yaitu *monitoring* sebagai tahap pengumpulan pengetahuan dan *capacity building and problem solving* sebagai tahap tindak lanjut nyata.

Pada tahap *monitoring* yang diuraikan dalam Bab II, kelima *working group* bermandat lingkungan, yaitu ACAP, AMAP, CAFF, EPPR, dan PAME secara sistematis memantau kondisi lingkungan Arktik sesuai bidangnya masing-masing. AMAP menghasilkan asesmen ilmiah terkait pencemaran dan perubahan iklim, CAFF memantau keanekaragaman hayati melalui *Circumpolar Biodiversity Monitoring Programme*, PAME memetakan sampah laut dan aktivitas pelayaran, EPPR menilai kelayakan respons terhadap tumpahan minyak, sedangkan ACAP mengawasi sumber-sumber pencemaran. Tahap ini menghasilkan fondasi epistemik

bagi seluruh tindakan berikutnya, sebab tanpa data dan asesmen tersebut, upaya perlindungan lingkungan akan kehilangan dasar dan arah yang jelas.

Pada tahap *capacity building and problem solving* yang diuraikan dalam Bab III, temuan *monitoring* tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata melalui empat instrumen yang saling melengkapi, yaitu saran ahli (*expert advice*), penafsiran aturan (*rule interpretation*), bantuan finansial (*financial assistance*), dan bantuan teknis (*technical assistance*). Dimensi bantuan finansial ditopang oleh *Project Support Instrument* (PSI) sebagai tulang punggung pembiayaan, yang sepanjang 2014 hingga 2023 membiayai 26 proyek lingkungan dengan 15 di antaranya telah selesai (NEFCO, 2023). Lalu tindakan konkret/nyata tampak pada hibah pengelolaan sampah dan penghentian busa AFFF oleh ACAP, asesmen AMAP yang menjadi basis Konvensi Stockholm dan Minamata, inisiatif konservasi burung migran AMBI oleh CAFF, latihan kesiapsiagaan tumpahan minyak oleh EPPR, serta *Regional Action Plan on Marine Litter* dan *Arctic Coastal Cleanup* oleh PAME yang kegiatannya tumbuh pesat dari tujuh menjadi 70 kegiatan dalam empat tahun.

Dengan demikian, Arctic Council berfungsi sebagai aktor operasional yang menerjemahkan komitmen perlindungan lingkungan menjadi proyek konkret melalui organ-organnya. Namun, karena seluruh instrumen bersifat sukarela dan bertumpu pada konsensus, efektivitas implementasinya dibatasi oleh kemauan serta kapasitas negara anggota dan rentan terhadap dinamika geopolitik (Barry et al., 2020). Keterbatasan ini paling jelas terlihat dari pembekuan PSI sejak Juni 2022 sebagai dampak invasi Rusia ke Ukraina yang menyebabkan sejumlah proyek

terhenti. Meskipun demikian, fakta bahwa sebagian proyek fungsional tetap berjalan menunjukkan bahwa kerja sama teknis di tingkat *working group* memiliki daya tahan tersendiri di tengah ketegangan politik yang tinggi.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, argumentasi utama penelitian ini terbukti, bahwa implementasi *Strategic Plan Arctic Council* pada periode 2021 sampai 2025 paling tepat dipahami melalui penggunaan *management approach*. Capaian perlindungan lingkungan di kawasan Arktik merupakan hasil dari fasilitasi, penyediaan kapasitas, dan kerja sama sukarela, bukan dari penegakan yang bersifat memaksa. Arctic Council menjalankan fungsi implementatifnya sebatas kapasitas kelembagaannya sebagai organisasi berbasis kerja sama yang tidak mengekang, sehingga keberhasilan perlindungan lingkungan pada akhirnya bergantung pada komitmen kolektif negara-negara Arktik beserta mitra globalnya.

4.2 Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan meninjau periode setelah tahun 2025 guna melihat konsistensi dan keberlanjutan implementasi *Strategic Plan* pada masa keketuaan berikutnya. Selain itu, kajian berikutnya akan lebih mendalam apabila menambahkan sumber data primer, seperti wawancara dengan perwakilan *working groups* atau lembaga nasional, serta melakukan studi perbandingan dengan organisasi regional lain yang turut mengelola isu lingkungan lintas batas. Dengan demikian, penelitian di masa mendatang diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai organisasi internasional berbasis

konsensus dalam mendorong perlindungan lingkungan, khususnya di kawasan Arktik.